

**PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI
RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN,
SOSIAL, DAN EKONOMI**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Sebutan Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun Oleh:

SEKAR PERMATA SWIETENIA PUTRI

NIT. 20293422

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
PROGRAM DIPLOMA IV PERTANAHAN**

2024

ABSTRACT

The Code River is supposed to be a conservation area but is used for residential areas. Land limitations and the lack of urban spatial planning systems in providing housing needs for residents have led to illegal and irregular settlements around the riverbanks. This research was conducted to determine the process of arranging Jogoyudan slums through relocation and its impact from environmental, social, and economic aspects. The research method that will be applied in this study is the qualitative method of descriptive analysis. This research will be carried out field observation activities, conducting interviews, and documentation at the research location. The results of this study show that the success of slum arrangement through relocation can be seen from the list of slum locations in Yogyakarta City in 2021 that slum settlements in Kapanewon Gowongan no longer exist and the development of vertical villages in the form of Jogoyudan Rental Simple Flats has a positive impact on environmental, social, and economic aspects when compared to the conditions before the construction of Jogoyudan Rental Simple Flats.

Keyword: *Slum Settlement Arrangement, Relocation, Impact.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	II
PERNYATAAN KEASLIAN.....	III
MOTTO	IV
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII
DAFTAR GAMBAR.....	X
DAFTAR TABEL.....	XI
DAFTAR LAMPIRAN.....	XII
INTISARI.....	XIII
<i>ABSTRACT</i>	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Penelitian Terdahulu	7
B. Landasan Teori.....	15
1. Penataan Permukiman Kumuh	15
2. Relokasi	16
3. Kampung Vertikal	17
4. Bantaran Sungai.....	21
5. Dampak Penataan Permukiman Kumuh melalui Relokasi.....	22
E. Kerangka Pemikiran.....	26
F. Pertanyaan Penelitian	27
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A. Format Penelitian	28
B. Lokasi Penelitian.....	29
C. Teknik Pemilihan Informan	29

D. Definisi Operasional Konsep	30
E. Jenis Data	31
F. Teknik Pengumpulan Data	32
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	39
A. Gambaran Umum Kapanewon Gowongan, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta	39
B. Gambaran Umum Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jogoyudan Kota Yogyakarta.....	44
BAB V PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH JOGOYUDAN MELALUI RELOKASI DAN DAMPAKNYA DARI ASPEK LINGKUNGAN, SOSIAL, DAN EKONOMI	48
A. Penataan Permukiman Kumuh Jogoyudan melalui Relokasi.....	48
B. Dampak Penataan Permukiman Kumuh Jogoyudan melalui Relokasi dari Aspek Lingkungan, Sosial, dan Ekonomi	68
BAB VI	88
A. Kesimpulan.	88
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	96

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sungai Code merupakan salah satu sungai yang memiliki sistem drainase yang kurang memadai sehingga air sungai seringkali meluap dan mengakibatkan banjir saat musim hujan tiba (Widodo, 2010). Kondisi geografis dan sistem drainase yang kurang baik menyebabkan air hujan tidak mempunyai tempat untuk mengalir dengan baik sehingga menggenangi jalan dan tempat tinggal warga di sekitaran bantaran Sungai Code (Widodo, 2010). Sungai Code yang seharusnya menjadi daerah konservasi tetapi digunakan untuk daerah permukiman penduduk (Setyowati dan Muzaki, 2021).

Keterbatasan lahan dan kurangnya sistem tata ruang kota dalam menyediakan kebutuhan hunian untuk penduduk menimbulkan pemukiman ilegal dan tidak teratur di sekitar bantaran sungai (Harahap, 2021). Terjadinya ketidakseimbangan antara ketersediaan dengan kebutuhan tanah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal menyebabkan tumbuh dan berkembangnya penguasaan, pemilikan, dan pemanfaatan tanah secara tidak sah, lingkungan kumuh, dan timbulnya tindakan kejahatan karena harga tanah yang selalu naik secara tidak wajar (Sumardjono, 2008). Banyak masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Yogyakarta yang tidak mempunyai tempat tinggal hal ini menciptakan tekanan terhadap ketersediaan lahan hunian, maka dari itu, menyebabkan harga tanah di suatu daerah menjadi melonjak (Pratama, Yusuf dan Helmi, 2016). Selain itu, Adanya pertambahan jumlah penduduk menyebabkan timbulnya urbanisasi ke permukiman dan wilayah ditepian sungai dapat berakibat terjadinya permukiman yang tidak tertata dengan baik (Renata, Arifah dan Darmawan, 2020).

Adanya permasalahan ini mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh (*slum area*) yang mempunyai dampak buruk untuk masyarakat setempat dan lingkungan sekitar (Sumardjono, 2008). Ciri-ciri adanya permukiman kumuh di perkotaan meliputi adanya jalan kecil, kurangnya pencahayaan matahari, ruang yang terbatas di rumah, bangunan yang tidak

permanen, penggunaan infrastruktur umum, pelanggaran tata ruang, dan berada di tanah yang bukan miliknya (Hariyono, 2010). Permukiman kumuh akan berakibat buruk bagi makhluk hidup yang berada di permukiman tersebut (Renata, Arifah dan Darmawan, 2020). Munculnya permukiman kumuh di kota besar dapat disebabkan oleh beberapa hal.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh menjelaskan bahwa perumahan kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian, sedangkan permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Resiko dari adanya permukiman kumuh mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan dapat mengalami kerusakan akibat dari pembuangan sampah sembarangan oleh penduduk yang berada di permukiman kumuh (Arung dan Ulimaz, 2021). Banyak penduduk di pemukiman kumuh berada di garis kemiskinan, tingginya tingkat kemiskinan disebabkan oleh rendahnya kemampuan dan pendidikan masyarakat (Saputra, Sukmaniar dan Hapiz Hermansyah, 2022). Selain itu, ekonomi penduduk yang rendah mengakibatkan tingginya tingkat kriminalitas di permukiman kumuh (Saputra, Sukmaniar dan Hapiz Hermansyah, 2022). Beberapa hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat dan apabila tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerugian di lingkungan sekitarnya.

Dalam hal ini, salah satu upaya penanganan yang dilakukan yaitu dengan melakukan relokasi permukiman yang berada di bantaran sungai (Musthofa, 2011). Program relokasi permukiman tersebut dilakukan sebagai solusi untuk melakukan penataan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta khususnya permukiman yang berada pada lahan yang bukan diperuntukan untuk permukiman (Musthofa, 2011). Relokasi termasuk salah satu alternatif untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tinggal di permukaan kumuh, status tanahnya tidak legal, atau tinggal di lingkungan yang rawan

bencana untuk menata kembali dan melanjutkan kehidupannya di tempat yang baru (Musthofa, 2011).

Mengingat lahan di area permukiman kumuh sangat terbatas, sementara ada fungsi-fungsi yang harus disediakan untuk penyediaan permukiman yang memenuhi syarat, maka pilihan relokasi permukiman kumuh dengan membangun kampung vertikal menjadi jalan keluar yang baik. Selain itu, pembangunan kampung vertikal sebagai solusi yang potensial sebagai sarana memecahkan permasalahan mengenai pemukiman yang berada di bantaran Sungai Code. Perancangan permukiman secara vertikal diharapkan dapat memberikan solusi permukiman yang lebih tertata dan efisien, mengurangi jumlah permukiman kumuh, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Hamdani dan Teh, 2022).

Kampung vertikal merupakan sekelompok hunian pada sebuah tempat untuk para warga berpenghasilan rendah yang bangunannya dibangun tegak lurus dari bawah ke atas (Satungpol, 2013). Kampung vertikal adalah transformasi dari kampung yang sudah ada di tepi sungai, dengan tetap mempertahankan ciri khas lokal, termasuk ragam bentuk, warna, bahan bangunan, volume, siluet bangunan, potensi ekonomi, ide kreatif warga, dan aspek lainnya (Yu Sing, 2016). Kampung vertikal dapat juga disebut sebagai rumah susun yang merupakan tempat tinggal pada wilayah yang didominasi oleh masyarakat berpenghasilan rendah dengan bangunan vertikal (Widiananda, 2018).

Kampung vertikal didesain di dalam lingkungan yang terstruktur dengan baik, menggabungkan ruang horizontal dan vertikal, sehingga fasilitas seperti area bermain anak, tangga, teras, tempat parkir, dan lainnya dapat dimanfaatkan bersama tanpa mengorbankan ruang hijau (Karima, Purwantiasning dan Prayogi, 2018). Kampung vertikal bisa menjadi opsi alternatif untuk menanggapi pertumbuhan populasi yang cepat dan memberikan solusi terhadap kebutuhan akan tempat tinggal (Yu Sing, 2016). Selain bermanfaat dalam mengatasi permukiman kumuh, keberadaan kampung vertikal memiliki dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi.

Salah satu dampak yang sering terjadi terkait aspek lingkungan yaitu penggunaan lahan yang lebih efektif dan efisien di daerah perkotaan yang padat penduduk (Harahap, 2021). Oleh karena itu, diharapkan kampung vertikal dapat membantu mengurangi tekanan terhadap lahan terbuka dan mengurangi kebutuhan akan perluasan kota ke wilayah yang lebih luas (Harahap, 2021). Akan tetapi, kampung vertikal juga mempunyai dampak mengenai perubahan tata guna lahan, pengurangan ruang terbuka hijau, dan dapat mengurangi kualitas lingkungan (Harahap, 2021).

Dilihat dari aspek sosial kampung vertikal dapat memberikan pengaruh kehidupan sosial pada masyarakat (Ramadhani *et al.*, 2021). Hal ini dapat menciptakan komunitas yang beragam, dapat menciptakan pertumbuhan bisnis, dan melestarikan budaya di kawasan tersebut (Ramadhani *et al.*, 2021). Namun, terdapat juga dampak negatif adanya kampung vertikal seperti kesenjangan sosial antar masyarakat, tekanan terhadap infrastruktur, dan masalah kriminalitas yang tinggi (Ramadhani *et al.*, 2021).

Selain itu, dilihat dari aspek ekonomi kampung vertikal mempunyai dampak ekonomi yang signifikan terkait dengan pembangunan perkotaan (Septiani, 2022). Pembangunan kampung vertikal dapat meningkatkan efisiensi ruang dan mengoptimalkan nilai properti (Septiani, 2022). Hal ini dapat menguntungkan pengembang dan pemilik properti dengan meningkatkan potensi keuntungan dari investasi mereka, menciptakan peluang baru dalam sektor pembangunan dan industri. Namun, penting untuk diperhatikan bahwa efek ekonomi ini tidak selalu merata, dan ada kekhawatiran tentang kemungkinan harga properti yang tidak terjangkau bagi penduduk lokal serta masalah kesenjangan ekonomi yang dapat timbul (Putra, 2024).

Penting untuk memahami mengenai penataan permukiman kumuh melalui relokasi dan dampaknya dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi pada masyarakat bantaran Sungai Code karena terdapat permasalahan yang disebabkan oleh lokasi bantaran sungai yang seharusnya menjadi daerah konservasi tetapi digunakan untuk daerah permukiman, keterbatasan lahan

dan kurangnya sistem tata ruang kota dalam menyediakan kebutuhan hunian, serta adanya penambahan penduduk yang menyebabkan timbulnya urbanisasi ke wilayah tepian. Permasalahan ini mengakibatkan terbentuknya permukiman kumuh di bantaran sungai yang berdampak buruk bagi masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, penelitian mengenai dampak lingkungan, sosial, dan ekonomi masyarakat bantaran Sungai Code pada program penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi menjadi hal yang perlu dipertimbangkan. Peneliti tertarik untuk meneliti penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dan dampaknya dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi melalui fenomena yang ada sehingga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi banyak orang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi?
2. Bagaimana dampak penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang ada, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi.
2. Mengetahui dampak penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi berbagai pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung terutama hal praktis dan teoritis, yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan, meningkatkan pengetahuan yang dimiliki, serta menerapkan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan mengenai penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dan dampak penataan

permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dan dampak penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi dari aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi yang nantinya dapat digunakan sebagai pengembangan kebijakan atau tindakan yang berkelanjutan dalam instansi yang berkaitan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi berhasil direalisasikan dengan melakukan pembangunan Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Jogoyudan dan program Mundur Munggah Madep Kali (M3K). Keberhasilan penataan permukiman kumuh melalui relokasi terlihat dari daftar lokasi permukiman kumuh Kota Yogyakarta tahun 2021 bahwa permukiman yang berada di Kecamatan Jetis memiliki tingkat kekumuhan ringan dengan tingkat kepadatan >400 Jiwa/Ha yang tersebar di Kapanewon Bumijo dan Cokrodiningratan. Sedangkan, permukiman kumuh yang berada di Kapanewon Gowongan sudah tidak ada lagi.
2. Dampak dari aspek lingkungan adanya penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi, yaitu lingkungan menjadi lebih bersih, teratur, tertata, dan meminimalisir perkembangan permukiman kumuh di bantaran Sungai Code. Dampak dari aspek sosial adanya penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi, yaitu terdapat pengembangan keterampilan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan kelembagaan. Dampak dari aspek ekonomi adanya penataan permukiman kumuh Jogoyudan melalui relokasi, yaitu memberikan peluang kepada penghuni untuk membuka usaha sehingga pendapatan penghuni dapat meningkat.

B. Saran

1. Meningkatkan pembangunan yang serupa dengan Rusunawa Jogoyudan untuk meningkatkan penataan permukiman kumuh di bantaran sungai.
2. Pemerintah dapat meningkatkan inovasi dalam melakukan pemberdayaan yang lebih beragam jenisnya kepada penghuni Rusunawa Jogoyudan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwijaya (2016) *Modul Perencanaan Drainase Permukaan Jalan*. Bandung.
- Alfiani, S. Dan Nawawi, Z.M. (2023) “Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Dalam Pembukaan Pelatihan Dan Perluasan Kesempatan Kerja Di Kota Medan,” *Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(1), Hal. 55–61.
- Armi, A., Soeaidy, S. Dan Hayat, A. (2016) “(Studi Kasus Relokasi Pasar Dinoyo Malang),” *Jurnal Administrasi Publik*, 4(10), Hal. 1–6.
- Arung, R. Dan Ulimaz, M. (2021) “Analisis Faktor Penyebab Kumuh Pemukiman Kumuh Di Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan,” *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota*, 17(4), Hal. 472–481. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.14710/pwk.v17i4.37953>.
- Ayuningtyas (2022) “No Title,” *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 5(1), Hal. 12–26.
- BPLH (2014) *Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah (Slhd)*. Yogyakarta: Pemerintah Kota Yogyakarta.
- Bedu, Syarif, and M Yahya. 2005. “Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Berbasis Penataan Bangunan Dan Lingkungan.” Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Hassanudin Makasar.
- Brontowiyono, W., Lupiyanto, R. Dan Wijaya, D. (2010) “Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat,” *Jurnal Sains & Teknologi Lingkungan*, 2(1), Hal. 07–20.
- Dwijosusilo, K. *Et Al.* (2023) “Dampak Kebijakan Pemindahan Ke Rusunawa Wonorejo Terhadap Warga Tepi Sungai Jagir Wonokromo Surabaya,” *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 7(1), Hal. 71–87.
- Fadjarani, S. Dan Ruli As’ari (2018) “Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan,” *Jurnal Geografi*, 15(1), Hal. 56–67. Tersedia Pada: <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/jg/index>.
- Fakhri, H., Astuti, W. Dan Andini, I. (2023) “Penataan Permukiman Kumuh Di Kawasan Hp 00001 Kelurahan Mojo Dan Dampaknya Terhadap Kualitas Hidup Masyarakat,” *Desa-Kota*, 5(1), Hal. 64. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.20961/desa-kota.v5i1.67515.64-76>.
- Ginting, A.M. Dan Rasbin (2010) “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap

- Tingkat Kemiskinan Di Indonesia Sebelum Dan Setelah Krisis,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 2(1), Hal. 279–312.
- Gunawan (2022) *Metode Penelitian Kualitatif: Teori Dan Praktek*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hadiwijaya (2021) *Analisis Manfaat Dan Dampak Ekonomi Dan Sosial Pada Pemanfaatan Bmn Satuan Kerja Politeknik Kelautan Dan Perikanan Pangandaran, Kementerian Keuangan RI*.
- Hakki, W. (2015) *Dampak Pemanfaatan Bantaran Sungai Terhadap Kualitas Lingkungan Di Kelurahan Pasar Krui*. Universitas Lampung.
- Hamdani, E.V. Dan Teh, S.W. (2022) “Peran Hunian Vertikal Dengan Pendekatan Arsitektur Berkelanjutan Terhadap Kualitas Hidup Dan Kesadaran Masyarakat Akan Kurangnya Penghijauan,” *Jurnal Sains, Teknologi, Urban, Perancangan, Arsitektur (Stupa)*, 4(2), Hal. 1859–1872. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.24912/Stupa.V4i2.22303>.
- Harahap, I.H. (2021) “Analisis Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Dan Dampaknya Bagi Warga Kota Dki Jakarta,” *Journal Of Entrepreneurship, Management, And Industry (Jemi)*, 4(1), Hal. 18–24.
- Hardiyati, M., Hasanah, A.W. Dan Rohman, N. (2023) “Analisis Kesejahteraan Sosial Sebagai Disiplin Ilmu,” *Icodev: Indonesian Community Development Journa*, 4(2), Hal. 89–94.
- Hariyono, P. (2010) *Perencanaan Pembangunan Kota Dan Perubahan Paradigma*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Hartanto, A.T. (2015) “The Impact Of Resettlement Of Defferent Communities In Marunda Rent-Flat Housing, North Of Jakarta On Social Capital.”
- Ibrahim (2018) *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Karima, A.G., Purwantiasning, A.W. Dan Prayogi, L. (2018) “Konsep Kampung Vertikal Pada Penataan Kawasan Rawan Banjir Dengan Konsep Kampung Vertikal Di Kampung Melayu Jakarta,” *Jurnal Arsitektur Purwarupa*, 2(2), Hal. 11–18.
- Kurniawan, K.D., Hardiana, A. Dan Putri, R.. (2015) “Komparasi Perubahan Aspek Sosial Ekonomi Pada Penghuni Rumah Susun Pasca Penanganan

- Squatter Di Kota Surakarta,” *Region: Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Perencanaan Partisipatif*, 1(6), Hal. 7.
- Kusumo, Y.E., Widiyati, W. Dan Astuti, P. (2015) “Analisis Kebijakan Pembangunan Rusunawa Kabupaten Kendal,” *Journal Of Politic And Governmental Studies*, 5(4), Hal. 1–12.
- Leepel, R.J., Utomo, S.W. Dan Suganda, E. (2017) “Aspek Lingkungan Dan Partisipasi Masyarakat Pada Penyelenggaraan Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat (Accessibility Of Rented Simple Flats In Perspective Of Sustainable Housing),” *Jurnal Manusia Dan Lingkungan*, 24(3), Hal. 116. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.22146/jml.23638>.
- Manzanaris, M., Rares, J. Dan Kiyai, B. (2018) “Dampak Kebijakan Relokasi Pasar Tradisional Rawajaya Di Wilayah Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara,” *Jurnal Administrasi Publik*, 4(52), Hal. 1–15.
- Mardiansyah Arisandi, Pangemanan, S.E. Dan Singkoh, F.C. (2020) “Tata Kelola Pemerintah Dalam Relokasi Pasar Kayu Bulan Di Kota Manado,” *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 2(5), Hal. 1–9.
- Marshall, Catherine & Rossman, Gretchen B. 2006. *Designing Qualitative Research*. Thousand Oaks: Sage Publications.
- Maryanto, D. (2017) “Dampak Pembangunan Rusunawa Gununganyar Terhadap Kinerja Simpang Rungkut Madya Gununganyar Sawah Kota,” *Jurnal Edukasi New Normal (Jenn)*, 2(2), Hal. 1–8.
- Maspaitella, M.J. Dan Rahakbauwi, N. (2014) “Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial,” *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 5(4).
- Mulia, E.M. *Et Al.* (2014) “Investigasi Pengaruh Jaringan Pipa Induk Air Limbah (Trunk Sewer) Terhadap Air Tanah Dalam (Studi Kasus Jaringan Mulai Pumping Hm. Yamin Sampai Dengan Ipal Cemara Medan),” *Jurnal Sains Dan Teknologi Istp*, 15(1), Hal. 100–111. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.59637/jsti.V15i1.70>.
- Musthofa, Z. (2011) “Evaluasi Semanggi.”
- Najah, L. (2020) *Perubahan Sosial Pada Warga Yang Teralokasi Ke Rumah*

Susun Muara Baru Akibat Normalisasi Waduk Pluit. Uin Syarif Hidayatullah Jakarta.

- Nursyahbani, Raisya, and Pigawati Bitta. 2015. "Kajian Karakteristik Kawasan Permukiman Kumuh Di Kampung Kota (Studi Kasus : Kampung Gandekan Semarang)." *Jurnal Teknik PWK* 4(2):267–81.
- Naomi, L. *Et Al.* (2023) "Studi Dampak Sosial Ekonomi Yang Ditimbulkan Oleh Adanya Pembangunan Rusunawa Sadang Serang Kota Bandung," In *Prosiding Ftsp, Jl. Phh.* Bandung, Hal. 652–657.
- Nawawi, H. (2005) *Penelitian Terapan.* Yogyakarta: Gajah Mada University.
- Nazir, M. (1988) *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurfeta, C.M. (2013) "Pendekatan, Dengan Organik, Arsitektur."
- Olthuis, K. *Et Al.* (2015) "Slum Upgrading: Assessing The Importance Of Location And A Plea For A Spatial Approach," *Habitat International*, 50(February), Hal. 270–288. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.08.033>.
- Poedjioetami, E. (2008) "Penataan Ulang Kawasan Bantaran Sungai Dengan Menghadirkan Sentra Ekonomi Dan Rekreasi Kota Studi Kasus Kawasan Dinoyo Tenun, Surabaya," *Jurnal Rekayasa Perencanaan*, 3(4), Hal. 191–200.
- Pratama, D., Yusuf, M. Dan Helmi (2016) "Kajian Kondisi Dan Sebaran Kualitas Air Di Perairan Selatan Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Oseanografi*, 5(4), Hal. 479–488.
- Putra, F.R.A. (2024) "Pengaruh Kesenjangan Ekonomi Terhadap Stabilitas Sosial Dan Politik Di Indonesia," *Tugas Mahasiswa Ekonomi*, 1(1), Hal. 1–11.
- Putra, M.Z. (2023) "Strategi Dan Bentuk Perubahan Sosial Para Pelaku Umkm Pada Masa Pandemi Covid-19," *Jurnal Analisa Sosiologi*, 1(12), Hal. 174–199.
- Ramadhani, A.N. *Et Al.* (2021) "Kampung Vertikal Sebagai Strategi Urban Renewal Di Kampung Lumumba, Surabaya," *Jurnal Arsitektur Nalars*, 20(2), Hal. 109–118.
- Ramlah, Tahir, M. Dan Ma'ruf, A. (2021) "Evaluasi Dampak Program Rumah

- Susun Lette Kecamatan Mariso Kota Makassar,” *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik*, 2(4), Hal. 1231–1246.
- Rastri, P. Dan Chistianingrum, R. (2017) “Pengaruh Investasi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja,” *Jurnal Budget*, 2(1).
- Ratnasari, E. (2019) *No, Estuarine, Coastal And Shelf Science*.
- Renata, A.A., Arifah, M. Dan Darmawan, E. (2020) “Rumah Susun Di Yogyakarta Dengan Pendekatan Kampung Vertikal,” *Jurnal Poster Pirata Syahada*, 1(2), Hal. 2009.
- Rosilawati, H. (2016) *Konsep Hunian Berkelanjutan Pada Rumah Susun : Studi Kasus Rusunawa Dupak Bangunrejo, Surabaya*. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.
- Saputra, W., Sukmaniar Dan Hapiz Hermansyah, M. (2022) “Permukiman Kumuh Perkotaan: Penyebab, Dampak Dan Solusi,” *Environmental Science Journal (Esjo) : Jurnal Ilmu Lingkungan*, 1(1), Hal. 12–17. Tersedia Pada: <https://doi.org/10.31851/Esjo.V1i1.10929>.
- Sari, A.R. (2022) *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Menurut Prespektif Ekonomi Islam (Studi Pada Lkm-A Gapoktan Sido Jaya Abadi Desa Trijaya Kecamatan Penawartama Kabupaten Tulang Bawang)*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Satungpol, N. (2013) *Kampung Batik Vertikal Di Panggungharjo, Sewon, Bantul*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Septiani, A. (2022) “Pembangunan Perumahan Layak Untuk Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Rusunawa Keputih Surabaya),” *Jip (Jurnal Industri Dan Perkotaan) Volume*, 18(2), Hal. 47–53.
- Setyowati, P. Dan Muzaki, M. (2021) “Gambaran Pengelolaan Sanitasi Lingkungan Di Sungai Code Yogyakarta,” *Unm Environmental Journal*, 4(2).
- Subekti, R. *et al.* (2021) “Konsolidasi Tanah Perkotaan Dalam Rangka Penyediaan Tanah Untuk Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh,” *e-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha*, 4(3).

- Siyoto, S. Dan Sodik, A. (2015) *Dasar Metodologi Penelitian*. Literasi Media Publishing.
- Soekanto (2006) *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Solekhan, M.N. (2019) *Proyek Akhir Sarjana Kampung Vertikal Jogoyudan, Yogyakarta Dengan Pendekatan Urban Farming*. Universitas Islam Indonesia.
- Sugiyono (2009) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumardjono, M.S. (2008) *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya*. Jakarta: Buku Kompas.
- Surtiani, E.E. (2006) “Intossicazione Acuta Da Anidride Carbonica: Descrizione Di Due Casi Mortali,” *Medicina Del Lavoro*, 93(1), Hal. 26–33.
- Suryadi, G., Thamrin Dan Murad, A. (2016) “Perilaku Masyarakat Dalam Memanfaatkan Air Sungai Siak Sebagai Sumber Kehidupan Dan Dampaknya Terhadap Estetika Serta Kesehatan Lingkungan Di Wilayah Waterfront City Pekanbaru,” *Dinamika Lingkungan Indonesia*, 3(2), Hal. 100–106.
- Swasto, D.F. (2016) “Vertical Living Opportunities And Challenges For Low-Income People In Southeast Asia Case Of Indonesia,” *The 1st Internasional Conference On South East Asia Studies* [Preprint].
- Taaluru (2015) “Kampung Vertikal Di Sindulang, Humanisme Dalam Arsitektur,” *Sam Ratulangi University* [Preprint].
- Triyani, D. (2021) “Analisis Morfologi Sungai,” *Geomorfologi: Sebuah Ulasan*, Hal. 1–7.
- Triatmadja, R., 2006. Draft Jaringan Air Bersih. *Yogyakarta: Beta Offset*.
- Wahyuningsih (2022) “Implementasi Kebijakan Pemanfaatan Tanah Untuk Pemukiman Di Wilayah Garis Sempadan Sungai Dki Jakarta.
- Widiananda, A.B. (2018) “Peranan Dan Pemanfaatan Ruang Publik Pada Permukiman Kampung Vertikal Rusun Pekunden Kota Semarang,” *Jurnal Pembangunan Wilayah Dan Kota* [Preprint].
- Widodo (2010) “Pengelolaan Kawasan Sungai Code Berbasis Masyarakat.

Wiradi (2009) *Metodologi Studi Agraria*. Bogor: Sajogyo Institute.

Yu Sing (2016) “Kampung Vertikal Cingised.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rumah Susun.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bantuan Pembangunan dan Pengelolaan Rumah Susun.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Rumah Susun.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Yogyakarta Tahun 2021-2041.

Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.